



**POTENSI WARISAN BUDAYA YANG TERABAIKAN: EVALUASI  
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN  
BENTENG SANROBONE DI INDONESIA**

**Indra Andriani Hamda, Muh.Akbar, Suhasman**

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Hasanuddin, Indonesia

**Abstrak**

Kawasan Benteng Sanrobone merupakan salah satu kawasan yang kaya akan potensi sumberdaya arkeologi. Potensi arkeologi pada Kawasan Benteng Sanrobone antara lain Struktur Benteng Sanrobone, Struktur Bastion, Kompleks Makam Raja Sanrobone, Makam Kare Panca Belong, Makam Gaddong, Makam Tamma Danggung, Sumur Tua, Mesjid Tua Sanrobone dan meriam. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi penulis, pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, penulis bermaksud meninjau kembali riwayat pelestarian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pengelolaan Pemerintah Daerah terhadap Kawasan Benteng Sanrobone, serta melakukan evaluasi terhadap pelestarian dan pengelolaan yang telah terealisasi dengan tetap mengacu pada UU No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya dan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Adapun tahap pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data pustaka, survei lapangan, wawancara dan penyebaran kuesioner penelitian. Hasil dari keempat metode pengumpulan data yang dilakukan kemudian diolah dan diinterpretasi untuk mendapatkan satu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa belum maksimalnya pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone. Hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Benteng Sanrobone, dan kurang maksimalnya koordinasi antar sektor dalam bidang kebudayaan.

**Kata Kunci:** Pelestarian, Pengelolaan, Pemerintah, Kawasan Benteng Sanrobone.

## PENDAHULUAN

Kawasan Benteng Sanrobone di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kawasan yang memiliki nilai historis dan potensi sumber daya arkeologi yang luar biasa. Benteng ini tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Kerajaan Sanrobone, tetapi juga menyimpan berbagai artefak penting seperti struktur bastion, kompleks makam Raja Sanrobone, makam Kare Panca Belong, makam Gaddong, dan berbagai peninggalan lainnya, termasuk masjid tua dan meriam (Irfan, 2015). Keberadaan kawasan ini menandai kekayaan budaya lokal yang dapat menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. Namun, potensi luar biasa ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat identitas budaya dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.



**Gambar 1. Struktur Benteng yang Dipugar**

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Warisan budaya merupakan salah satu kekayaan yang memiliki nilai sejarah, seni, dan sosial tinggi yang perlu dilestarikan. Sebagai bagian dari identitas suatu bangsa, warisan budaya tidak hanya mencerminkan perjalanan sejarah, tetapi juga menjadi daya tarik yang berpotensi mendukung sektor ekonomi melalui pariwisata. Benteng ini menyimpan jejak sejarah penting dari masa kerajaan di Sulawesi Selatan dan

menjadi simbol perjuangan serta kebesaran budaya lokal. Sayangnya, potensi besar yang dimiliki oleh Benteng Sanrobone masih terabaikan, mengakibatkan kawasan ini belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan lokal dan pelestarian warisan budaya secara menyeluruh (Hidayah, 2020; Wahyuni, 2021)

Minimnya perhatian terhadap pelestarian kawasan ini tidak hanya berdampak pada degradasi fisik bangunan, tetapi juga pada hilangnya nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelestarian, lemahnya dukungan kebijakan pemerintah, dan terbatasnya alokasi anggaran menjadi hambatan utama dalam pengelolaan kawasan ini. Padahal, dengan pengelolaan yang tepat, Benteng Sanrobone berpotensi menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik wisatawan lokal maupun internasional. Hal ini sesuai dengan temuan Santoso dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa warisan budaya dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi jika dikembangkan secara terencana dan berkelanjutan.

Di sisi lain, kurangnya kajian ilmiah yang fokus pada kebijakan pelestarian kawasan ini juga menjadi kendala signifikan. Banyak kebijakan pelestarian di Indonesia yang bersifat reaktif dan kurang berbasis data, sehingga implementasinya tidak optimal (Rahmawati, 2022). Untuk itu, diperlukan pendekatan strategis yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal. Pendekatan ini akan memastikan bahwa upaya pelestarian dapat berjalan secara holistik, melestarikan nilai sejarah, sekaligus mengembangkan potensi ekonomi kawasan (Rahayu, 2023). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelestarian dan pengelolaan Kawasan

Benteng Sanrobone guna merumuskan rekomendasi strategis yang relevan bagi pengembangan kawasan tersebut.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone masih jauh dari optimal. Masalah pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone yang masih jauh dari optimal dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya perhatian terhadap pengelolaan yang berbasis partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Benteng Sanrobone, sebagai warisan budaya dan sejarah, memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Namun, dalam banyak kasus, kurangnya anggaran, minimnya pemahaman masyarakat mengenai nilai sejarah kawasan ini, serta lemahnya regulasi menjadi hambatan utama. Sebagai hasilnya, upaya pelestarian sering kali terabaikan, dan kawasan ini menghadapi risiko kerusakan lebih lanjut akibat faktor alam maupun ulah manusia.

Selain itu, kurangnya promosi dan pengelolaan destinasi wisata berbasis sejarah turut memperburuk keadaan. Padahal, Benteng Sanrobone memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Minimnya infrastruktur pendukung, seperti aksesibilitas, fasilitas publik, dan informasi yang memadai, membuat kawasan ini sulit diakses dan kurang diminati wisatawan. Menurut penelitian sebelumnya, peran aktif dari pemerintah daerah, swasta, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk menciptakan strategi yang efektif dalam pelestarian sekaligus pengembangan kawasan ini sebagai situs bersejarah yang berkelanjutan (Ardiansyah, 2020; Pratama, 2019). Minimnya upaya pelestarian tidak hanya terlihat pada

kurangnya perawatan fisik situs, tetapi juga pada tidak adanya program pengelolaan yang sistematis. Pemerintah daerah, yang seharusnya memegang peran sentral dalam konservasi kawasan ini, belum menunjukkan koordinasi yang efektif antar-sektor terkait, termasuk bidang kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata. Ketidakefektifan ini bertolak belakang dengan harapan yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1992 dan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menekankan perlunya perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan kawasan cagar budaya.

Studi sebelumnya mengenai pelestarian cagar budaya, seperti yang dilakukan di Situs Trowulan, Majapahit, menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi hambatan besar dalam upaya pelestarian (Theodorus dkk., 2021). Dalam konteks lain, penelitian di Kawasan Ampel Surabaya menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat sebagai salah satu elemen kunci dalam pengelolaan cagar budaya (Subianto, 2022). Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali tidak optimal akibat kebijakan yang belum menyentuh kebutuhan lokal secara komprehensif. Hasil serupa juga ditemukan pada studi pelestarian di Kawasan Dataran Tinggi Dieng, di mana konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah menghambat pelaksanaan zonasi cagar budaya (Rully, 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya koordinasi dan partisipasi dalam pengelolaan cagar budaya, studi tentang Kawasan Benteng Sanrobone masih sangat terbatas. Tidak banyak kajian yang mendalami bagaimana kebijakan pelestarian dan pengelolaan diterapkan di kawasan ini, serta bagaimana efektivitasnya dalam mempertahankan nilai budaya kawasan

tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan terhadap pentingnya evaluasi sistematis terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Tanpa adanya studi yang mendalam, sulit untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan serta menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Padahal, evaluasi kebijakan sangat penting untuk memastikan pelestarian nilai budaya dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Menurut Hasanuddin (2021), kebijakan pelestarian warisan budaya di Indonesia sering kali diimplementasikan tanpa kajian awal yang memadai, sehingga hasilnya tidak efektif dalam menjaga nilai-nilai budaya yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) dalam literatur, khususnya terkait strategi yang diperlukan untuk mengintegrasikan upaya pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan cagar budaya.

Artikel ini menawarkan pendekatan evaluatif terhadap pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone berdasarkan kerangka hukum yang ada, termasuk UU No. 5 Tahun 1992 dan UU No. 11 Tahun 2010. Keunikan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai kurangnya koordinasi antar-sektor dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk pelestarian cagar budaya di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada serta menawarkan rekomendasi strategis untuk

mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan multimetode yang mencakup pengumpulan data pustaka, survei lapangan, wawancara, dan kuesioner untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi kawasan saat ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menyoroti tantangan dalam pelestarian Kawasan Benteng Sanrobone, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai kawasan ini sebagai warisan budaya yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan cagar budaya di tingkat nasional maupun internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dirancang untuk mengevaluasi pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui empat metode utama: studi pustaka, survei lapangan, wawancara terstruktur, dan penyebaran kuesioner. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh referensi teoritis dan kerangka hukum yang relevan, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta literatur terkait pelestarian budaya. Survei lapangan dilakukan untuk mendokumentasikan kondisi fisik situs, termasuk struktur benteng, bastion, kompleks makam, sumur tua, meriam, dan masjid tua, dengan menggunakan teknik pencatatan, dokumentasi foto, dan pemetaan sebaran sumber daya arkeologi.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan informan dari Pemerintah Daerah, Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan masyarakat lokal

untuk menggali informasi terkait kebijakan, kendala, dan persepsi mereka terhadap pengelolaan kawasan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan mereka dengan kawasan Benteng Sanrobone. Penyebaran kuesioner melibatkan pengunjung kawasan untuk mengukur persepsi mereka terhadap pelestarian dan pengelolaan, dengan indikator meliputi aksesibilitas, fasilitas, kebersihan, publikasi, dan kenyamanan. Responden dipilih berdasarkan kriteria berusia 15 tahun ke atas dan pernah mengunjungi Benteng Sanrobone.

Data yang terkumpul melalui berbagai metode tersebut diolah melalui proses verifikasi, klasifikasi, dan analisis tematik. Hasil survei lapangan dianalisis secara komprehensif dengan membandingkan kondisi fisik situs terhadap standar pelestarian yang diatur dalam kerangka hukum. Temuan dari wawancara dan kuesioner diinterpretasikan untuk mengidentifikasi isu-isu utama, termasuk kurangnya koordinasi antar-sektor dan minimnya partisipasi masyarakat. Tahap akhir berupa interpretasi data menghasilkan evaluasi mendalam yang memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pelestarian dan pengelolaan kawasan ini. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi empiris dalam mendukung pelestarian berkelanjutan dan pengelolaan cagar budaya secara holistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya Pengelolaan Benteng Sanrobone

Kawasan Benteng Sanrobone yang terletak di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar dikelola langsung oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Bentuk pengelolaan yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, pembangunan fasilitas dan penyusunan konsep rencana pengelolaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan terkait upaya pengelolaan yang akan dilakukan. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah terkait pembagian tugas setiap ada bentuk pelestarian yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bentuk koordinasi dalam melakukan pelestarian Kawasan Benteng Sanrobone antara lain koordinasi mengenai kegiatan ekskavasi yang dilakukan pada tahun 1992, pemetaan pada tahun 1996, pemugaran pada tahun 2001-2002, survei tahun 2009 hingga kegiatan zonasi yang dilakukan pada tahun 2010.

Selain itu, bentuk koordinasi lain yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan Pemerintah Pusat adalah berkoordinasi mengenai pengangkatan juru pelihara yang ditugaskan pada Kawasan Benteng Sanrobone. Juru pelihara yang ditugaskan diambil dari Masyarakat Sanrobone. Masing-masing juru pelihara memiliki tanggungjawab terhadap pelestarian kawasan objek tinggalan yang ada pada Kawasan Benteng Sanrobone.

Akan tetapi, koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, hanya berupa monitoring. Sejauh ini, belum ada rencana pemanfaatan yang dilakukan terhadap Kawasan Benteng Sanrobone. Hal ini dipertegas oleh data wawancara dengan Chalid (34 tahun), selaku pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan mengatakan bahwa koordinasi yang dilakukan belum sampai pada tahap rencana

pemanfaatannya, hanya sebatas monitoring.

**Upaya Pelestarian Benteng Sanrobone**

Merujuk pada riwayat pelestarian, instansi yang berperan dalam melakukan pelestarian terhadap potensi arkeologis pada Kawasan Benteng Sanrobone adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan.

**Tabel 5. Riwayat Pelestarian Kawasan Benteng Sanrobone**

No	Riwayat Pelestarian	Tahun Terlaksana
1.	Ekskavasi	1992
2.	Pemetaan	1996
3.	Pemugaran	2001-2002
4.	Pelaksanaan Studi Teknis	2001
5.	Survei	2009
6.	Zonasi	2010

Sumber: Database Potensi Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Prov. Sulawesi Selatan.

**Ekskavasi Penyelamatan**

Penggalian penyelamatan situs Benteng Sanrobone pernah dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan Tenggara Ujung Pandang pada tahun 1992. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menyelamatkan benda purbakala, melacak toponim yang berkaitan dengan keberadaan Benteng Sanrobone, mencari kontekstual temuan meriam perunggu serta mencoba mengungkap latar belakang budaya situs Benteng Sanrobone melalui temuan ekskavasi. Landasan awal dalam melakukan ekskavasi penyelamatan, karena adanya informasi dari tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa dalam Kawasan Benteng Sanrobone terdapat benda-benda purbakala yang masih tertimbun di bawah tanah.

Berdasarkan hasil peninjauan, pernyataan tokoh masyarakat diperkuat dengan ditemukannya temuan

permukaan berupa fragmen keramik asing produksi dari China, Thailand, Jepang dan Eropa. Landasan kuat yang melatari pelaksanaan ekskavasi penyelamatan karena lokasi penemuan temuan permukaan berupa keramik berada pada kawasan permukiman dan lahan pertanian, serta merupakan areal pertambahan penduduk setempat. Sedangkan kawasan tersebut diduga masih memiliki banyak tinggalan arkeologis.

Selain itu, berdasarkan hasil survei lokasi, terdapat meriam perunggu yang ditemukan dalam Kawasan Benteng Sanrobone. Faktor-faktor tersebut yang memperkuat landasan Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan Tenggara Ujung Pandang melakukan ekskavasi penyelamatan pada tahun 1992. Penelitian ini menghasilkan banyaknya temuan benda Cagar Budaya yang ditemukan pada kawasan Benteng Sanrobone sebagai kawasan bersejarah (Muhammad ramli dkk, 1992: 15-47).

**Pemetaan**

Berdasarkan riwayat pelestarian yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan, salah satu bentuk pelestarian Kawasan Benteng Sanrobone yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan lokasi yang dilaksanakan pada tahun 1996. Output dari kegiatan ini menghasilkan data peta lokasi yang bisa dijadikan acuan dalam melakukan rencana penelitian selanjutnya. Akan tetapi, berdasarkan informasi dari Chalid (34 tahun), selaku pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan, data pemetaan lokasi yang telah dilakukan ini, arsipnya sudah tidak ada di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya.

**Pemugaran**

Bentuk pelestarian yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar

Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan adalah melaksanakan pemugaran pada tahun 2001- 2002. Salah satu bentuk pemugaran yang dilakukan adalah dengan melakukan pemugaran pada dinding benteng bagian utara tepatnya berada di dekat Bastion Mallaga. Akan tetapi, berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara, penulis tidak mendapatkan informasi terkait bagian mana saja yang dipugar. Sumber rujukan satu-satunya hanya berasal dari data zonasi yang dilakukan pada tahun 2010. Data tersebut menjelaskan bahwa salah satu bagian benteng, tepatnya di sisi utara dekat dari Bastion Mallaga pernah dipugar pada tahun 2001. Hal ini sesuai dengan kondisi struktur benteng bagian utara memang tampak lebih rapi dibandingkan dengan struktur benteng lain yang tersisa pada Kawasan Benteng Sanrobone.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone belum dilaksanakan secara maksimal, meskipun kawasan ini memiliki potensi arkeologis dan nilai sejarah yang signifikan. Struktur benteng, bastion, kompleks makam, sumur tua, masjid tua, dan meriam merupakan tinggalan arkeologi yang ada di kawasan tersebut, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan. Observasi lapangan menunjukkan banyak struktur yang rusak akibat faktor lingkungan seperti pelapukan, pertumbuhan vegetasi yang tidak terkendali, serta kurangnya perawatan. Beberapa bagian benteng bahkan telah hilang akibat pembangunan permukiman, tambak, dan jalan aspal yang tidak mempertimbangkan pelestarian kawasan cagar budaya.

Kuesioner yang disebarakan kepada 75 pengunjung mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan pengunjung terhadap fasilitas pelestarian seperti aksesibilitas, kebersihan, papan

informasi, dan publikasi sangat rendah. Hanya sebagian kecil pengunjung yang menilai fasilitas ini memadai, menunjukkan bahwa aspek infrastruktur mendukung belum menjadi prioritas dalam pengelolaan kawasan. Penelitian ini juga menemukan bahwa papan informasi yang seharusnya berfungsi sebagai panduan pengunjung berada dalam kondisi rusak dan tidak terawat.

Dari hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), teridentifikasi bahwa kurangnya koordinasi antar-sektor menjadi salah satu kendala utama. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya menjalankan perannya dalam pengelolaan cagar budaya, sementara BPCB lebih berfokus pada upaya penyelamatan fisik seperti ekskavasi dan pemugaran, yang sering kali tidak berlanjut ke tahap pemanfaatan kawasan untuk edukasi dan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian yang ada masih bersifat parsial dan kurang terintegrasi.

Pembahasan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan manajemen sumber daya budaya (Cultural Resource Management/CRM) yang holistik untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelestarian Kawasan Benteng Sanrobone. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengakuan resmi kawasan ini sebagai cagar budaya, yang menyebabkan minimnya perlindungan hukum. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, langkah seperti penetapan zonasi dan regulasi perlindungan dapat meningkatkan status hukum kawasan ini.

Studi ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian. Dalam konteks Kawasan Benteng Sanrobone, masyarakat lokal belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan. Padahal,

pengalaman dari pelestarian di situs lain seperti Trowulan dan Ampel menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap keberlanjutan cagar budaya.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan program pelestarian yang terintegrasi melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Program ini harus mencakup pemugaran struktural, peningkatan fasilitas publik, penyediaan informasi edukatif, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan tersebut, Kawasan Benteng Sanrobone berpotensi menjadi model pelestarian cagar budaya yang tidak hanya melestarikan nilai sejarah tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelestarian dan pengelolaan Kawasan Benteng Sanrobone yang kaya akan potensi sumber daya arkeologi namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Kawasan ini memiliki berbagai tinggalan penting seperti struktur benteng, bastion, kompleks makam, sumur tua, masjid tua, dan meriam, yang semuanya mencerminkan nilai sejarah dan budaya yang signifikan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian dan pengelolaan kawasan ini masih jauh dari optimal, dengan berbagai masalah yang mencakup kerusakan fisik situs, kurangnya perawatan, dan lemahnya koordinasi antar-sektor. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya keterlibatan Pemerintah Daerah dan minimnya upaya pelestarian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) menjadi faktor utama dalam kurangnya perlindungan kawasan ini. Selain itu, infrastruktur pendukung, seperti aksesibilitas, kebersihan, papan informasi, dan publikasi, dinilai tidak

memadai oleh pengunjung. Studi ini juga menemukan bahwa masyarakat setempat belum sepenuhnya dilibatkan dalam upaya pelestarian, yang mengurangi potensi kawasan ini sebagai objek edukasi dan pariwisata. Signifikansi temuan ini terletak pada pengungkapan kesenjangan antara kebijakan pelestarian yang ada dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang perlunya pendekatan manajemen sumber daya budaya (Cultural Resource Management/CRM) yang holistik untuk mengintegrasikan upaya pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan. Namun, penelitian ini memiliki kelemahan yang lebih berfokus pada aspek pelestarian fisik dan belum mengeksplorasi potensi ekonomi kawasan secara mendalam.

Potensi penelitian masa depan mencakup pengembangan studi tentang dampak ekonomi pelestarian cagar budaya terhadap masyarakat lokal serta eksplorasi lebih lanjut tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. (2020). Pelestarian Situs Sejarah di Indonesia: Kendala dan Solusi. *Jurnal Warisan Budaya*, 5(2), 123-135.
- Hasanuddin. (2021). Efektivitas Kebijakan Pelestarian Warisan Budaya di Indonesia: Studi Kasus Beberapa Situs Bersejarah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(3), 89-101.
- Hidayah, P. &. (2020). Peluang dan Tantangan Pelestarian Warisan Budaya Lokal di Indonesia. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 12(1), 45-57.
- Irfan. (2015). Perkembangan Seni Kerajinan Keramik Berbasis Pendekatan Desain. *Journal of EST*, 1, 58-74.
- Pratama, W. &. (2019). Pengembangan Pariwisata Sejarah Berbasis Komunitas. *Jurnal Pariwisata Dan Kebudayaan*, 8(1), 45-60.



Rahayu, K. &. (2023). Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Pelestarian Situs Sejarah. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(1), 12–28.

Rahmawati. (2022). Evaluasi Kebijakan Pelestarian Warisan Budaya di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 78–92.

Rully, G. &. (2022). Evaluasi Kebijakan Pelestarian Zonasi Dan Cagar Budaya Di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 27(1), 1–10.

Santoso dkk. (2021). Optimalisasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Sejarah dan Budaya. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 15(1), 23–39.

Subianto, F. &. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kawasan Ampel Surabaya. *Public Sphere Review*, 1(2), 1–7.

Theodorus dkk. (2021). Evaluasi Pada Pengelolaan, Pemanfaatan, Dan Pelestarian Cagar Budaya Berkelanjutan Pada Situs Majapahit, Trowulan. *Panalungtik*, 4(1), 47–60.

Wahyuni. (2021). Pengelolaan Cagar Budaya di Era Modern: Studi Kasus Kawasan Benteng. *Jurnal Warisan Indonesia*, 9(2), 34–48.